

PENGADILAN AGAMA BIMA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2024

Jl. Gatot Subroto No. 10

Mpunda – Kota Bima - Nusa Tenggara Barat

Telp. 0374-6191134

e-mail : info@pa-bima.go.id web : www.pa-bima.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BIMA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 10

Mpunda – Kota Bima - Nusa Tenggara Barat

Telp. 0374-6191134

e-mail : info@pa-bima.go.id website : www.pa-bima.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Bima adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Bima. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bima, 12 Juli 2024

Klasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



OSMAN, S.Ag.

NIP. 196612311997031021

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan.....	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca.....	7
III. Laporan Operasional.....	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Dasar Hukum.....	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bima	Error! Bookmark not defined. 13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A.4. Basis Akuntansi	16
A.5. Dasar Pengukuran	16
A.6. Kebijakan Akuntansi	17
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	25
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	25
B.2. Belanja	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	29
C.1. Aset Lancar.....	29
C.2. Aset Tetap	31
C.3. Aset Lainnya	35
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	35
C.6. Ekuitas.....	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	37
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	37
D.2. Beban Pegawai.....	38

D.3. Beban Persediaan.....	39
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	39
D.5. Beban Pemeliharaan	40
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	40
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	41
D.8. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	41
D.9. Beban Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	42
D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	42
D.11. Beban Beban Lain-lain.....	43
D.12. Kegiatan Non Operasional.....	43
D.13. Pos Luar Biasa	44
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	44
E.1. Ekuitas Awal	44
E.2. Surplus (defisit) LO	44
E.3. Koreksi Yang menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Nilai Persediaan	45
E.4. Koreksi Nilai Persediaan	45
E.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	45
E.6. Transaksi Antar Entitas.....	45
E.7. Kenaikan/Penurunan Ekuitas	46
E.8. Ekuitas Akhir	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	46
F.2. Pengungkapan Lain-lain	46
Laporan-laporan Pendukung.....	50
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	Error! Bookmark not defined.
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	Error! Bookmark not defined.

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	2
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	3
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	19
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	21
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	23
Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2024	25
Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2024 dan 2023	25
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024	26
Tabel 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 dan 30 Juni 2023	26
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	27
Tabel 11 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	27
Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	28
Tabel 13 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2024 dan TA 2024	28
Tabel 14 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 2023	29
Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	29
Tabel 16 Rincian Piutang Bukan Pajak.....	30
Tabel 17 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2024 dan 2023.....	30
Tabel 18 Rincian Aset Tetap	31
Tabel 19 Rincian Saldo Tanah	31
Tabel 20 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	34
Tabel 21 Rincian Aset Lainnya.....	35
Tabel 22 Rincian Aset tak Berwujud.....	35
Tabel 23 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 2023	36
Tabel 24 Rincian Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2024	37
Tabel 25 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023.....	38
Tabel 26 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	39
Tabel 27 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	39
Tabel 28 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023.....	40
Tabel 29 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	40
Tabel 30 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	41
Tabel 31 Rincian Beban Bantuan Sosial	41
Tabel 32 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	42
Tabel 33 Rincian Beban Piutang tak Tertagih.....	43
Tabel 34 Rincian Beban Lain-lain	43
Tabel 35 Rincian Kegiatan Non Operasional	43
Tabel 36 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	44
Tabel 37 Rincian Koreksi Nilai Persediaan.....	45

***PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB***

PENGADILAN AGAMA BIMA

Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda Kota Bima - Nusa Tenggara Barat

Telp. 0374-6191134 e-mail : info@pa-bima.go.id web: pa-bima.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bima, 12 Juli 2024

Klasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



OSMAN, S.Ag.
NIP. 196612311997031021

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2024 s.d. 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,622,784.

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Bima pada TA 2024 adalah sebesar Rp3,981,771,548 atau mencapai 55.05 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7,232,427,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran/Estimasi	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	2,435,000	1,622,784	66.64	1,217,175
Belanja Negara	7,232,427,000	3,981,771,548	55.05	3,979,656,446

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2024 dan 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp7,243,741,588 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp15,399,735; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp7,228,341,853; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp417,340,632 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp417,340,632 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp6,826,400,956; Jumlah Kewajiban dan ekuitas sebesar Rp7,243,741,588.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	TA 2024	TA 2023	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	15,399,735	550,000	14,849,735	2,699.95
Aset Tetap	7,228,341,853	7,357,590,434	(129,248,581)	(1.76)
Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset	7,243,741,588	7,358,140,434	(114,398,846)	(1.55)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	417,340,632	802,561	416,538,071	51,901.11
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban	417,340,632	802,561	416,538,071	51,901.11
Ekuitas				
Ekuitas	6,826,400,956	7,357,337,873	(530,936,917)	(7.22)
Jumlah Ekuitas	6,826,400,956	7,357,337,873	(530,936,917)	(7.22)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	7,243,741,588	7,358,140,434	(114,398,846)	(1.55)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1,893,178, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4,512,978,919, sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(4,511,085,741).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp60 dan surplus (defisit) sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami surplus (defisit)-LO sebesar Rp(4,511,085,681).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal Tahun 2024 adalah sebesar Rp7,357,337,873, dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar Rp(4,511,085,681) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3,980,148,764, dengan kenaikan ekuitas sebesar Rp(530,936,917) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp6,826,400,956.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2024, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
A	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	2,435,000	1,622,784	66.64	1,217,175
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		2,435,000	1,622,784	66.64	1,217,175
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	6,048,261,000	3,225,658,548	53.33	3,237,135,471
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1,184,166,000	756,113,000	63.85	742,520,975
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara		7,232,427,000	3,981,771,548	55.05	3,979,656,446

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA BIMA
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2024	TA 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	10,000,000	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 2.	270,454	0
Persediaan	C.1. 3.	5,129,281	550,000
Jumlah Aset Lancar		15,399,735	550,000
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	3,538,955,000	3,538,955,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	3,304,390,125	3,304,390,125
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	4,224,343,200	4,224,343,200
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	5,348,929	5,348,929
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	(3,844,695,401)	(3,715,446,820)
Jumlah Aset Tetap		7,228,341,853	7,357,590,434
Aset Lainnya	C.3		
Aset tak Berwujud	C.3. 1.	12,100,000	12,100,000
Aset lainnya yang belum diregister	C.3. 2.	0	0
Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya	C.3. 3.	(12.100.000)	(12.100.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		7,243,741,588	7,358,140,434
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang kepada pihak ketiga	C.4. 1.	405,271,632	802,561
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4. 2.	2,069,000	0
Uang Muka Dari KPPN	C.4. 3.	10,000,000	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4. 4.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		417,340,632	802,561
Jumlah Kewajiban		417,340,632	802,561
EKUITAS			
Ekuitas	C.5		
Ekuitas	C.5. 1.	6,826,400,956	7,357,337,873
Jumlah Ekuitas		6,826,400,956	7,357,337,873

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana**7,243,741,588****7,243,741,588**

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2024	TA 2023
Kegiatan Operasional			
<i>Pendapatan Operasional</i>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D. 1	1,893,178	1,217,043
Jumlah Pendapatan		1,893,178	1,217,043
<i>Beban Operasional</i>			
Beban Pegawai	D. 2	3,604,653,569	3,574,117,837
Beban Persediaan	D. 3	30,564,719	15,222,250
Beban Barang dan Jasa	D. 4	382,407,050	431,613,850
Beban Pemeliharaan	D. 5	295,107,000	230,796,475
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	70,998,000	94,830,700
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	129,248,581	153,693,604
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		4,512,978,919	4,500,274,716
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4,511,085,741)	(4,499,057,673)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(defisit) pelepasan aset non Lancar		0	(9,546,000)
Surplus/(defisit) penyelesaian kewajiban Jangka panjang		0	0
Surplus/(defisit) dari kegiatan non Operasional lainnya		60	132
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		60	(9,545,868)
<i>Pos Luar Biasa</i>			
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus/(defisit) dari pos luar Biasa		0	0
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(4,511,085,681)	(4,508,603,541)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2024	TA 2023
Ekuitas Awal	E. 1	7,357,337,873	7,402,615,817
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(4,511,085,681)	(4,508,603,541)
Koreksi Yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Lain-lain			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	3,980,148,764	4,013,176,771
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(530,936,917)	(495,426,770)
Ekuitas Akhir		6,826,400,956	6,907,189,047

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMMK.06/2014;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- q. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagian Akun Standar;
- r. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- s. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bima

Visi Pengadilan Agama Bima adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang profesional dan modern dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Misi Pengadilan Agama Bima adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung RI;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas dan bertaqwa;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bima melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Bidang Perkara

Peningkatan mutu pelayanan kepada pencari keadilan dalam menerima perkara, peningkatan proses persidangan pemeriksaan perkara, peningkatan kualitas putusan/penetapan, peningkatan mutu penyelesaian perkara, penyediaan layanan informasi mengenai jalannya tahapan-tahapan persidangan dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga bisa diakses secara umum demi terwujudnya keterbukaan informasi dalam bidang pelayanan penyelesaian perkara dengan mengembangkan sistem SIPP.

2. Bidang Pengawasan Internal

Meningkatkan mutu pengawasan terhadap perilaku dan kinerja hakim dan pejabat kepaniteraan baik yang bersifat rutin maupun insidental, meningkatkan mutu pengawasan terhadap kinerja seluruh pegawai dan pejabat sekretariat baik yang bersifat rutin maupun insidental.

3. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Kepegawaian

Meningkatkan mutu pelayanan dan kesejahteraan seluruh pegawai yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi dan mutasi, pemberian cuti, dan laporan kepegawaian.

4. Bidang Pengelolaan Keuangan

Meningkatkan mutu perencanaan dan realisaasi dalam bidang Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, dengan tetap berpegang kepada prinsip pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

5. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Meningkatkan mutu administrasi tata persuratan, meningkatkan mutu pengelolaan barang-barang inventaris kantor serta administrasi dan pemeliharaan, meningkatkan mutu kebersihan dan keamanan kantor, meningkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga lainnya.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bima.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI *online* dan SAKTI *offline*, yang menggunakan sistem *single entry point*, *single database*, *multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.

2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Bima menerapkan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp1,622,784*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1,622,784. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Bima adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,435,000	1,622,724	66.64
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	60	0
Total Pendapatan	2,435,000	1,622,784	66.64

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2024 mendapatkan pendapatan sebesar Rp1,622,784, mengalami kenaikan sebesar Rp405,609 atau 33.32% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas penyewaan rumah dinas yang digunakan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima sejak Januari 2024 hingga Juni 2024.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	1,622,724	1,217,043	405,681	33.33
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	60	132	(72)	(54.55)
Total Pendapatan		1,622,784	1,217,175	405,609	33.32

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
3,981,771,5
48*

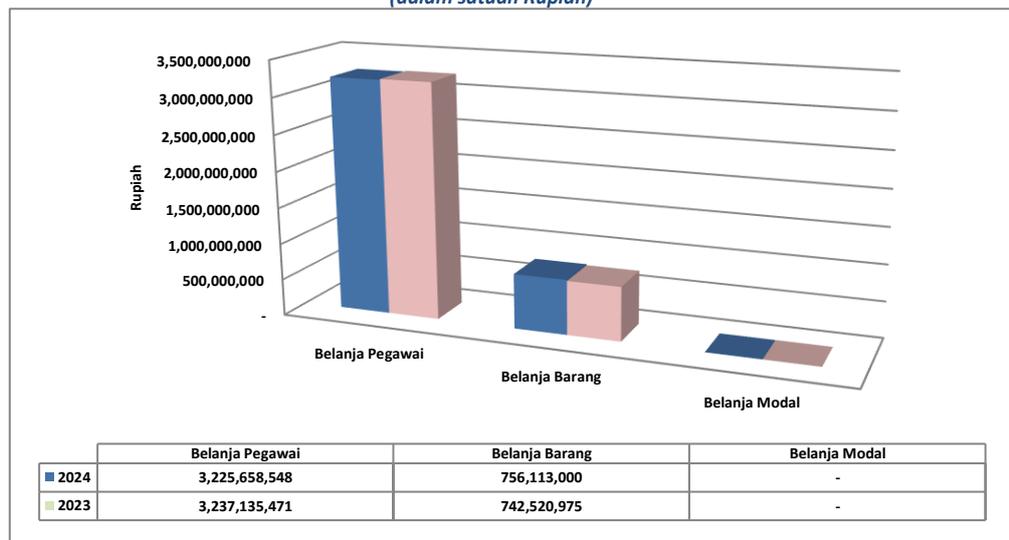
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Bima per 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp3,981,771,548 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 55.05% dari anggaran senilai Rp7,232,427,000 dengan sisa anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,250,655,452. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6,048,261,000	3,225,660,239	53.33
Belanja Barang	1,184,166,000	756,113,000	63.85
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	7,232,427,000	3,981,773,239	55.05
Pengembalian Belanja	0	1,691	0
Total Belanja Netto	7,232,427,000	3,981,771,548	55.05

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2024 & 2023

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp2,115,102 atau sebesar 0.05% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan oleh :

1. Turunnya realisasi belanja pegawai sebesar Rp(11,476,923) yang disebabkan oleh adanya promosi dan mutasi di lingkungan Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024
2. Naiknya realisasi belanja barang sebesar Rp13,592,025 yang disebabkan oleh naiknya realisasi Belanja Pemeliharaan.

Perbandingan realisasi belanja TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	3,225,658,548	3,237,135,471	(11,476,923)	(0.35)
Belanja Barang	756,113,000	742,520,975	13,592,025	1.83
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	3,981,771,548	3,979,656,446	2,115,102	0.05

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp.
3,225,658,5
48

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Bima per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp3,225,658,548 dan Rp3,237,135,471.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(11,476,923) atau sebesar (0.35)% dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain adanya promosi dan mutasi di lingkungan Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024.

Tabel 11 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,588,745,560	1,550,913,400	37,832,160	2.44
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,741	19,951	(210)	(1.05)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	111,578,340	113,239,980	(1,661,640)	(1.47)
Belanja Tunj. Anak PNS	32,036,412	33,803,690	(1,767,278)	(5.23)
Belanja Tunj. Struktural PNS	22,760,000	23,040,000	(280,000)	(1.22)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	983,680,000	1,017,145,000	(33,465,000)	(3.29)
Belanja Tunj. PPh PNS	203,338,606	169,712,566	33,626,040	19.81
Belanja Tunj. Beras PNS	72,347,580	80,168,940	(7,821,360)	(9.76)
Belanja Uang Makan PNS	148,614,000	185,757,000	(37,143,000)	(20.00)
Beban Tunjangan Umum PNS	13,940,000	13,385,000	555,000	4.15
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	48,600,000	49,950,000	(1,350,000)	(2.70)
Total Belanja Brutto	3,225,660,239	3,237,135,527	(11,475,288)	(0.35)
Pengembalian Belanja	1,691	56	1,747	2,919.64
Total Belanja Netto	3,225,658,548	3,237,135,471	(11,476,923)	(0.35)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
756,113,000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Bima per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp756,113,000 dan Rp742,520,975.

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13,592,025 atau sebesar 1.83% dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan karena naiknya realisasi Belanja Pemeliharaan.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	326,685,000	358,870,250	(32,185,250)	(8.97)
Belanja Barang Persediaan	35,144,000	18,598,000	16,546,000	88.97
Belanja Barang Non Operasional	0	6,728,400	(6,728,400)	(100.00)
Belanja Jasa	28,843,000	34,211,150	(5,368,150)	(15.69)
Belanja Pemeliharaan	294,443,000	229,282,475	65,160,525	28.42
Belanja Perjalanan Dinas	70,998,000	94,830,700	(23,832,700)	(25.13)
Total Belanja Brutto	756,113,000	742,520,975	13,592,025	1.83
Pengembalian Belanja	0	0	-	0
Total Belanja Netto	756,113,000	742,520,975	13,592,025	1.83

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal :Rp.
0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Bima per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2023. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2024 juga tidak terdapat anggaran anggaran Belanja Modal.

Tabel 13 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2024 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Belanja Penambahan nilai Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0

Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 15,399,735

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15,399,735 dan Rp550,000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Bima per 30 Juni 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 14 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0
Piutang Bukan Pajak	270,454	0
Persediaan	5,129,281	550,000
Total Aset Lancar	15,399,735	550,000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 10,000,000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp10,000,000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2024	TA 2023
-----	-------	---------	---------

1.	Uang Tunai di brankas	7,931,000	0
2.	Kwitansi UP	2,069,000	0
	Jumlah	10,000,000	0

Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 sebesar Rp10,000,000.

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak : Rp.
270,454*

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 270,454 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 pada Pengadilan Agama Bima merupakan piutang dari Pendapatan Sewa Rumah Dinas.

Tabel 16 Rincian Piutang Bukan Pajak
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2024	TA 2023
1.	Piutang Bukan Pajak	270,454	0
	Jumlah	270,454	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 5,129,281*

Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5,129,281 dan Rp550,000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Barang Konsumsi	5,129,281	550,000
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
	Total	5,129,281	550,000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan senilai Rp5,129,281 berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik nomor: 1002/SEK.PA.W22-A4/PL.1.2.7/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap :
Rp.
7,228,341,853

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 tersaji sebesar Rp7,228,341,853 dan Rp7,357,590,434 dengan penurunan sebesar Rp(129,248,581) atau sebesar (1.76)%. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan
1	Tanah	3,538,955,000	3,538,955,000	0
2	Peralatan dan Mesin	3,304,390,125	3,304,390,125	0
3	Gedung dan Bangunan	4,224,343,200	4,224,343,200	0
4	Aset Tetap Lainnya	5,348,929	5,348,929	0
	Jumlah	11,073,037,254	11,073,037,254	0
	Akumulasi Penyusutan	(3,844,695,401)	(3,715,446,820)	(129,248,581)
	Nilai Buku Aset Tetap	7,228,341,853	7,357,590,434	(129,248,581)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.
3.538.955.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.538.955.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 19 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	1.268 M ²	HAK PAKAI 01 / BG 661984	Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Bima	2.565.027.000
2.	1	920 M ²	HAK PAKAI 01 / BG 661983	Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Bima	391.168.000

Jumlah	3.538.955.000
--------	---------------

Nilai Aset Tetap berupa Tanah tidak mengalami perubahan per 30 Juni Tahun Anggaran 2024. Tidak ada penambahan aset tanah baru bagi Kantor Pengadilan Agama Bima. Seperti yang telah tertera di tabel, rincian tanah sebagai berikut:

1. Tanah untuk Bangunan Kantor dengan luas 1.268 M2 No. sertifikat HAK PAKAI 01 / BG 661984 Atas Nama Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI peruntukan Pengadilan Agama Bima senilai Rp2.565.027.000
2. Tanah untuk Rumah Dinas dengan luas 920 M2 No. sertifikat HAK PAKAI 01/ BG 661983 Atas Nama Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI peruntukan Pengadilan Agama Bima senilai 391.168.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
3,304,390,125*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3,304,390,125 dan Rp3,304,390,125. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	3,304,390,125
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2024	3,304,390,125
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(2,970,809,375)
Nilai Buku 30 Juni 2024	333,580,750

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
4,224,343,200*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4,224,343,200 dan Rp4,224,343,200.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	4,224,343,200
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2024	4,224,343,200
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(873,886,026)
Nilai Buku 30 Juni 2024	3,350,457,174

Tidak ada perubahan nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku 30 Juni 2024	0

Tidak ada perubahan nilai Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
5,348,929*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5,348,929 dan Rp5,348,929.

Nilai perolehan Aset tetap Lainnya tidak mengalami perubahan per 30 Juni 2024 dan 2023.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	5,348,929
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2024	5,348,929
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku 30 Juni 2024	5,348,929

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(3,844,695,401)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp(3,844,695,401) dan Rp (3,715,446,820).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 20 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	3,538,955,000	0	3,538,955,000
2	Peralatan dan Mesin	3,304,390,125	(2,970,809,375)	333,580,750
3	Gedung dan Bangunan	4,224,343,200	(873,886,026)	3,350,457,174
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	5,348,929	0	5,348,929
	Jumlah	11,073,037,254	(3,844,695,401)	7,228,341,853

Aset Lainnya:
Rp. 0

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 21 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Aset tak Berwujud	12.100.000	12.100.000
2	Aset Lainnya belum diregister	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	12.100.000	12.100.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(12.100.000)	(12.100.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.3.1 Aset tak berwujud

Aset tak
Berwujud :
Rp. 12.100.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp12.100.000 dan Rp12.100.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Software IT Kantor Pengadilan Agama Bima	12.100.000
	Jumlah Total	12.100.000

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Bima berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor Pengadilan Agama Bima. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2024.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp.
417,340,632*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp417,340,632 dan Rp802,561. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang di harapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan berupa Utang kepada pihak ketiga.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Bima per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 23 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Utang Kepada Pihak Ketiga	405,271,632	802,561
Utang Yang Belum Ditagihkan	2,069,000	0
Uang Muka dari KPPN	10,000,000	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
Jumlah	417,340,632	802,561

- Utang kepada pihak ketiga senilai Rp405,271,632,- berupa :
 1. Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Juli 2024 BRI senilai Rp.229,563,483,-
 2. Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Juli 2024 BSI senilai Rp.149,998,149,-
 3. Belanja Barang berupa Penghasilan PPNPN Induk bulan Juni 2024 senilai Rp.25,710,000,-
- Utang yang belum ditagihkan senilai Rp2,069,000,- merupakan Kwitansi UP belum di SPJ-kan per 30 Juni 2024.
- Uang muka dari KPPN senilai Rp10,000,000,- merupakan saldo UP yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal neraca.

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga:
Rp.
405,271,632*

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp405,271,632. dan Rp802,561. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.5.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan: Rp. 2,069,000

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2,069,000 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kwitansi uang persediaan (UP) belum di SPJ-kan per 30 Juni 2024.

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp. 10,000,000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp10,000,000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya: Rp. 0

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara.

C.6. Ekuitas

Ekuitas: Rp. 6,826,400,956

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6,826,400,956 dan Rp7,357,337,873. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP : Rp. 1,893,178

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1,893,178 dan Rp1,217,043. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 24 Rincian Realisasi PNBPNP per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	1,893,178	1,217,043	55.56

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
Total Pendapatan	1,893,178	1,217,043	55.56

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp. 3,604,653,56

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3,604,653,569 dan Rp3,574,117,837. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 25 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1,787,796,680	1,740,392,600	47,404,080	2.72
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(1,691)	(56)	(1,635)	2,919.64
Beban Pembulatan Gaji PNS	21,713	22,189	(476)	(2.15)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	125,561,980	126,646,890	(1,084,910)	(0.86)
Beban Tunj. Anak PNS	36,110,952	37,756,720	(1,645,768)	(4.36)
Beban Tunj. Struktural PNS	25,640,000	25,920,000	(280,000)	(1.08)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1,106,640,000	1,132,070,000	(25,430,000)	(2.25)
Beban Tunj. PPh PNS	220,322,435	182,879,274	37,443,161	20.47
Beban Tunj. Beras PNS	81,472,500	89,873,220	(8,400,720)	(9.35)
Beban Uang Makan PNS	148,614,000	165,472,000	(16,858,000)	(10.19)
Beban Tunjangan Umum PNS	15,775,000	15,035,000	740,000	4.92
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	56,700,000	58,050,000	(1,350,000)	(2.33)
Total Beban Pegawai	3,604,653,569	3,574,117,837	30,535,732	0.85

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp.
30,564,719*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30,564,719 dan Rp15,222,250. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	30,564,719	15,222,250	15,342,469	100.79
Total Beban Persediaan	30,564,719	15,222,250	15,342,469	100.79

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp.
382,407,050*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp382,407,050 dan Rp431,613,850. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	323,155,000	345,728,600	(22,573,600)	(6.53)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	3,500,000	3,350,650	149,350	4.46
Beban Honor Operasional Satker	20,470,000	31,835,000	(11,365,000)	(35.70)
Beban Barang Operasional lainnya	6,675,000	9,996,000	(3,321,000)	(33.22)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	6,728,400	(6,728,400)	(100.00)
Beban Langganan Listrik	0	0	0	0
Beban Langganan Telepon	1,316,050	1,327,100	(11,050)	(0.83)
Beban Sewa	27,291,000	32,648,100	(5,357,100)	(16.41)
Total Beban Barang dan Jasa	382,407,050	431,613,850	(49,206,800)	(11.40)

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.
295,107,000*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp295,107,000 dan Rp230,796,475. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	160,295,000	114,058,500	46,236,500	40.54
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	20,800,000	20,723,500	76,500	0.37
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114,012,000	96,014,475	17,997,525	18.74
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	295,107,000	230,796,475	64,310,525	27.86

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
70,998,000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp70,998,000 dan Rp94,830,700. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	70,998,000	94,830,700	(23,832,700)	(25.13)
Total Beban Perjalanan Dinas	70,998,000	94,830,700	(23,832,700)	(25.13)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 30 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-

D.8. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban
Bantuan
Sosial : Rp. 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 31 Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-

D.9. Beban Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi :
Rp.
129,248,581*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp129,248,581 dan Rp153,693,604. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 32 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	78,905,975	104,876,748	(25,970,773)	(24.76)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	50,342,606	46,404,072	3,938,534	8.49
Beban Penyusutan Jaringan	0	2,412,784	(2,412,784)	(100.00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	129,248,581	153,693,604	(24,445,023)	(15.91)
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	129,248,581	153,693,604	(24,445,023)	(15.91)

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.
0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Beban Lain-lain

*Beban Lain-
Lain : Rp. 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban
Kegiatan Non
Operasional :
Rp. 0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	9,546,000	(9,546,000)	(100.00)
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	9,546,000	(9,546,000)	(100.00)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp. 7,357,337,873 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7,357,337,873 dan Rp7,402,615,817.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp. (4,511,085,681) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(4,511,085,681) dan Rp(4,508,603,541). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Nilai Persediaan

*Koreksi yang menambah/mengurangi :
Rp. 0*

Koreksi Yang menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.4. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi nilai persediaan :
Rp.0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 37 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0

E.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi :
Rp 0*

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.6. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi antar entitas :
Rp.
3,980,148,764*

Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3,980,148,764 dan Rp4,013,176,771. Untuk TA 2024 Transaksi Antar Entitas mengalami penurunan sebesar Rp(33,028,007) dibandingkan dengan TA 2023.

E.7. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan ekuitas : Rp. (530,936,917)

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(530,936,917) dan Rp(495,426,770).

Kenaikan/Penurunan Ekuitas pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(35,510,147) dibandingkan dengan TA 2023.

E.8. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp 6,826,400,956

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6,826,400,956 dan Rp6,907,189,047. Nilai Ekuitas Akhir di TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(80,788,091) dari Ekuitas Akhir TA 2023.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang dapat untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada pemeriksaan BPK untuk laporan keuangan Tahun 2024 Pengadilan Agama Bima sehingga tidak ada tindak lanjut temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual untuk laporan keuangan periode 30 Juni 2024 adalah:

1. Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Juli 2024 BRI senilai Rp.229,563,483,-
2. Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Juli 2024 BSI senilai Rp.149,998,149,-
3. Belanja Barang berupa Penghasilan PPNPN Induk bulan Juni 2024 senilai Rp.25,710,000,-

F.2.3. Uang Muka dari KPPN senilai Rp. 0,-

Pada TA 2024 ini terdapat Saldo Kas sebesar Rp0 yang merupakan Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu yang tidak tercantum dalam TA 2023.

F.2.4. Rekening Operasional

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Bima adalah:

1. Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 307928, BPG 071 PA BIMA 01, Jenis Rekening Virtual Account Nomor 653243079281000, BANK RAKYAT INDONESIA CAB. BIMA dengan Nomor Persetujuan KPPN 000195/071 Tanggal 27 Mei 2021, yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.0.

F.2.5. Revisi DIPA

Untuk Periode pelaporan keuangan per 30 Juni Tahun 2024 Pengadilan Agama Bima melakukan 3 (tiga) kali Revisi DIPA, DIPA-005.01.2.307928/2024. Revisi pertama tanggal 13 Februari 2024, revisi kedua tanggal 22 April 2024, dan revisi ketiga tanggal 3 Juni 2024 terkait Pemutakhiran POK dan Revisi Data Halaman III DIPA.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Untuk Periode pelaporan keuangan per 30 Juni Tahun 2024 tidak terdapat Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Untuk Periode pelaporan keuangan per 30 Juni Tahun 2024 tidak terdapat catatan penting lainnya.

LAPORAN PENDUKUNG

LAMPIRAN A.1

PENYUSUTAN ASET TETAP

LAMPIRAN A.1
RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
131111	Tanah	2,188	3,538,955,000	0	0	0	3,538,955,000
2010101	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GTEMPAT TINGGAL	920	623,668,000	0	0	0	623,668,000
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	1,268	2,915,287,000	0	0	0	2,915,287,000
132111	Peralatan dan Mesin	516	3,304,390,125	(2,891,903,400)	(78,905,975)	(2,970,809,375)	333,580,750
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	3	487,000,003	(487,000,003)	0	(487,000,003)	0
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	8	141,130,400	(141,130,400)	0	(141,130,400)	0
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	48	152,468,798	(152,468,798)	0	(152,468,798)	0
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	6	104,734,624	(90,984,624)	(2,750,000)	(93,734,624)	11,000,000
3050201	MEUBELAIR	236	452,464,648	(452,464,648)	0	(452,464,648)	0
3050204	ALAT PENDINGIN	29	155,600,000	(155,600,000)	0	(155,600,000)	0
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	37	126,806,374	(99,556,374)	(5,450,000)	(105,006,374)	21,800,000

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	22	43,661,000	(32,382,400)	(3,066,600)	(35,449,000)	8,212,000
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	1	50,000,000	(25,000,000)	(5,000,000)	(30,000,000)	20,000,000
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	3	80,569,998	(80,569,998)	0	(80,569,998)	0
3060347	SUMBER TENAGA	1	200,000,000	(80,000,000)	(10,000,000)	(90,000,000)	110,000,000
3100101	KOMPUTER JARINGAN	1	17,840,000	(17,840,000)	0	(17,840,000)	0
3100102	PERSONAL KOMPUTER	83	996,245,561	(810,749,936)	(46,451,875)	(857,201,811)	139,043,750
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	33	129,937,129	(100,224,629)	(6,187,500)	(106,412,129)	23,525,000
3100204	PERALATAN JARINGAN	5	165,931,590	(165,931,590)	0	(165,931,590)	0
133111	Gedung dan Bangunan	4	4,224,343,200	(823,543,420)	(50,342,606)	(873,886,026)	3,350,457,174
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1	3,863,963,200	(668,739,880)	(47,689,900)	(716,429,780)	3,147,533,420
4010113	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	1	87,765,000	(13,422,881)	(1,032,529)	(14,455,410)	73,309,590
4010202	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	2	272,615,000	(141,380,659)	(1,620,177)	(143,000,836)	129,614,164
135121	Aset Tetap Lainnya	51	5,348,929	0	0	0	5,348,929
6010101	BUKU	51	5,348,929	0	0	0	5,348,929
JUMLAH		2,759.	11,073,037,254	(3,715,446,820)	(129,248,581)	(3,844,695,401)	7,228,341,853

Bima, 12 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



USMAN, S.Ag.

NIP. 196612311997031021

LAMPIRAN A.2

KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

LAMPIRAN A2
DAFTAR KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024

No	URAIAN AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	JUMLAH SD 1 JANUARI 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2024	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Bima, 12 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



USMAN, S.Ag.

NIP. 196612311997031021

LAMPIRAN A.3

HIBAH

LAMPIRAN A3
DAFTAR HIBAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Bima, 12 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



USMAN, S.Ag.

NIP. 196612311997031021

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTERAN TA 2024

Kode dan Nama UAKPA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA
 Kode dan Nama UAPPAW: (2300) NUSA TENGGARA BARAT
 Kode dan Nama Eselon I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	V		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	V		Ada
2. Neraca Percobaan AkruaI	V		Ada
3. Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V		Ada
KESESUAIAN LAPORAN DENGAN SAKTI/ MonSAKTI			
Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan Aplikasi Sakti/Monsakti termasuk perbandingan dengan tahun 2021?	V		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/ (Defisit)-LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V		Sama
2. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	V		Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
PENGECEKAN PADA MonSAKTI			
To Do List	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan		V	Tidak
2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		V	Tidak
3. Terdapat Persediaan belum Didetilkkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5. Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah dan CaLK)		V	Tidak
6. Terdapat Aset Belum Didetilkkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7. Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8. Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9. Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
10. Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V	Tidak
11. Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak

12. Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah dan CaLK</i>			
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA?		V	Tidak
2. Adakah "TDK COA" Yang BEDA?		V	Tidak
3. Adakah "TDK Detail" Yang BEDA?		V	Tidak
a. Pagu/DIPA		V	Tidak
b. Estimasi PNBP		V	Tidak
c. Belanja		V	Tidak
d. Pengembalian Belanja		V	Tidak
e. Pendapatan		V	Tidak
f. Pengembalian Pendapatan		V	Tidak
g. Kas BLU		V	Tidak
h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
i. Kas Hibah		V	Tidak
j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
Rekon Internal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak

Daftar MonSAKTI		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika Ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2.	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		V	Ada/Tidak
3.	Adakah Neraca Tidak Balance		V	Tidak
4.	Adakah Pagu Minus		V	Tidak
5.	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi		V	Tidak
6.	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
2.	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3.	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2.	Akun Penyisihan Piutang (116XXX) dan Akumulasi Penyusutan (137XXX dan 169XXX) bersaldo (K)	V		Ya
3.	Akun Kewajiban (2XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
4.	Akun Pendapatan (4XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
5.	Akun Pengembalian Pendapatan (4XXXXX) bersaldo (D)	V		Ya
6.	Akun Belanja/Beban (5XXXXX) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7.	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
2.	Terdapat Akun 1111XX hingga 1115XX. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116XX hingga 1119XX, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3.	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4.	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5.	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6.	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7.	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8.	Terdapat Akun 41XXXX/43XXXX (Pendapatan Perpajakan/Hibah)		V	Tidak
9.	Terdapat Akun 421XXX/422XXX/423XXX dan 425XXX KHUSUS BUN		V	Tidak
10.	Terdapat Akun 425XXX Khusus BUN (425143/ 144/ 161/ 162/ 719/ 745/ 772/ 773/ 774/ 815/ 816/ 998)		V	Tidak
11.	Terdapat Akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain/ Transfer TAYL)		V	Tidak
12.	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain)		V	Tidak
13.	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya

1.	Terdapat Akun Neraca (1XXXXX dan 2XXXXX) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2.	Terdapat Akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3.	Terdapat Akun 525XXX (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4.	Terdapat Akun 537XXX (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
Terkait Satker BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		N/A	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai tusi? Misalnya ada persediaan/ realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/ Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah / Bantuan Sosial		V	Tidak
2.	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya, kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
Hibah Langsung		Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung Uang/Barang/Jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			V	Ada/Tidak
1.	Adakah akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		N/A	Ada/Tidak
2.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan Saldo Awal)		N/A	Ada/Tidak
3.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan akun 391133 - Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		N/A	Ya
4.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Ya
5.	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan)?		N/A	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			N/A	Ada/Tidak
1.	Pengesahan Pendapatan Hibah (424XXX) jika Hibah Uang		N/A	Ya
Transfer Masuk/ Transfer Keluar dan Resiprokal		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MonSAKTI	0		
2.	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurangi TM di Neraca Percobaan)	0		
3.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2.	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		N/A	Ya/Tidak
3.	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di Neraca Percobaan Akrual?		N/A	Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya

1.	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal)		N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan dalam CaLK terkait koreksi persediaan serta dicantumkan dalam catatan telaah.		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2.	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5.	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau deposito	V		Ya
6.	Dari kolom perbandingan, adakah kenaikan/ penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7.	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8.	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat pendapatan perpajakan (Kecuali K/L 015)		V	Tidak
2.	Terdapat pendapatan hibah (43XXXX), beban pembayaran kewajiban utang (54XXXX), beban subsidi (55XXXX), beban hibah (56XXXX), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6XXXXX), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak
3.	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4.	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5.	Bandingkan dengan Laporan Operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/ penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6.	Surplus/ defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2.	Terdapat kenaikan/ penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3.	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
	Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			

2.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2.	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3.	Terdapat pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4.	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	V		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Ada Akun Piutang/Piutang TP/ Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/ Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		N/A	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		N/A	Ya/Tidak
2.	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		N/A	Ya/Tidak
3.	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4.	Ada Aset Tetap/ Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/ Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5.	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	- Jika ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		N/A	Ya
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
2.	Apakah ada Beban Bansos?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika, ada, Karwas dan/atau Memo harus ditatausahakan)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
2.	Ada realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	V		Ya/Tidak
	- Maka ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
3.	Ada akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4.	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
5.	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya

1.	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		N/A	Ya
2.	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3.	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		N/A	Ya
4.	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?		N/A	Ya
5.	Apakah Nilai SiLPA, SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(Defisit) pada LRA		N/A	Ya
6.	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU?		N/A	Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119XX, 111826, 1133XX, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?		N/A	Ya
2.	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		N/A	Ya
3.	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		N/A	Ya
4.	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
5.	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		N/A	Ya
6.	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		N/A	Ya
7.	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo Akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"</i>				

Mengetahui
 Pejabat Penyusun LKKL,

 (USMAN, S.Ag.)
 NIP. 196612311997031021

Bima, 12 Juli 2024
 Penelaah,

 (NAJIR, S.Ag.)
 NIP. 197606072001121003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BIMA 307928

Tgl Data : 19/07/24 12:25 AM
Tgl Cetak : 19/07/24 6:44 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	7,232,427,000	3,981,771,548	(3,250,655,452)	55	6,642,563,000	3,979,656,446	2,662,906,554	60
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

BIMA, 19 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



USMAN

196612311997031021

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 19/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 19/07/24 6:44 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0	10,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	270,454	0	270,454	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	270,454	0	270,454	0.00
Persediaan	5,129,281	550,000	4,579,281	832.60
JUMLAH ASET LANCAR	15,399,735	550,000	14,849,735	2,699.95
ASET TETAP				
Tanah	3,538,955,000	3,538,955,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,304,390,125	3,304,390,125	0	0.00
Gedung dan Bangunan	4,224,343,200	4,224,343,200	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	5,348,929	5,348,929	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,844,695,401)	(3,715,446,820)	(129,248,581)	3.48
JUMLAH ASET TETAP	7,228,341,853	7,357,590,434	(129,248,581)	(1.76)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	12,100,000	12,100,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(12,100,000)	(12,100,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	7,243,741,588	7,358,140,434	(114,398,846)	(1.55)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	405,271,632	802,561	404,469,071	50,397.30
Utang Yang Belum Ditagihkan	2,069,000	0	2,069,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	10,000,000	0	10,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	417,340,632	802,561	416,538,071	51,901.11
JUMLAH KEWAJIBAN	417,340,632	802,561	416,538,071	51,901.11
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	6,826,400,956	7,357,337,873	(530,936,917)	(7.22)
JUMLAH EKUITAS	6,826,400,956	7,357,337,873	(530,936,917)	(7.22)
JUMLAH EKUITAS	6,826,400,956	7,357,337,873	(530,936,917)	(7.22)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,243,741,588	7,358,140,434	(114,398,846)	(1.55)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 19/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 19/07/24 6:44 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

BIMA, 19 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



USMAN
196612311997031021

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2024
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 19/07/24 12:25 AM

Tgl Cetak : 19/07/24 6:43 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,893,178	1,217,043	676,135	55.556
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,893,178	1,217,043	676,135	55.556
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,893,178	1,217,043	676,135	55.556
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,604,653,569	3,574,117,837	30,535,732	0.854
Beban Persediaan	30,564,719	15,222,250	15,342,469	100.79
Beban Barang dan Jasa	382,407,050	431,613,850	(49,206,800)	(11.401)
Beban Pemeliharaan	295,107,000	230,796,475	64,310,525	27.865
Beban Perjalanan Dinas	70,998,000	94,830,700	(23,832,700)	(25.132)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 19/07/24 12:25 AM

Tgl Cetak : 19/07/24 6:43 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	129,248,581	153,693,604	(24,445,023)	(15.905)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,512,978,919	4,500,274,716	12,704,203	0.282
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,511,085,741)	(4,499,057,673)	(12,028,068)	0.267
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	(9,546,000)	9,546,000	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	9,546,000	(9,546,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	60	132	(72)	(54.545)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	60	132	(72)	(54.545)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	60	(9,545,868)	9,545,928	(100.001)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,511,085,681)	(4,508,603,541)	(2,482,140)	0.055
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,511,085,681)	(4,508,603,541)	(2,482,140)	0.055

Keterangan :

FINAL

BIMA, 19 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



USMAN
196612311997031021

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 19/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 19/07/24 6:44 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,357,337,873	7,402,615,817	(45,277,944)	(0.61)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,511,085,681)	(4,508,603,541)	(2,482,140)	0.06
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,980,148,764	4,013,176,771	(33,028,007)	(0.82)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(530,936,917)	(495,426,770)	(35,510,147)	7.17
EKUITAS AKHIR	6,826,400,956	6,907,189,047	(80,788,091)	(1.17)

Keterangan :

FINAL

BIMA, 19 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



USMAN

196612311997031021

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tgl Data : 30/07/24 6:25 PM

Tgl Cetak : 31/07/24 1:13 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307928 PENGADILAN AGAMA BIMA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		2,188	3,538,955,000	0	0	0	0	2,188	3,538,955,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	920	623,668,000	0	0	0	0	920	623,668,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	1,268	2,915,287,000	0	0	0	0	1,268	2,915,287,000
132111	Peralatan dan Mesin		516	3,304,390,125	0	0	0	0	516	3,304,390,125
3020101003	Station Wagon	Unit	3	487,000,003	0	0	0	0	3	487,000,003
3020104001	Sepeda Motor	Unit	8	141,130,400	0	0	0	0	8	141,130,400
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	3	9,834,073	0	0	0	0	3	9,834,073
3050104002	Lemari Kayu	Buah	17	58,702,797	0	0	0	0	17	58,702,797
3050104003	Rak Besi	Buah	11	36,473,272	0	0	0	0	11	36,473,272
3050104004	Rak Kayu	Buah	10	22,799,996	0	0	0	0	10	22,799,996
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	3,000,000	0	0	0	0	2	3,000,000
3050104007	Brandkas	Buah	1	12,110,660	0	0	0	0	1	12,110,660
3050104013	Buffet	Buah	4	9,548,000	0	0	0	0	4	9,548,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	20,000,000	0	0	0	0	1	20,000,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	25,544,667	0	0	0	0	1	25,544,667
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	29,599,998	0	0	0	0	2	29,599,998
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	2,089,959	0	0	0	0	1	2,089,959
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	27,500,000	0	0	0	0	1	27,500,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	71	101,406,590	0	0	0	0	71	101,406,590
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	108	237,788,611	0	0	0	0	108	237,788,611
3050201004	Kursi Kayu	Buah	4	6,600,000	0	0	0	0	4	6,600,000
3050201005	Sice	Buah	9	45,774,995	0	0	0	0	9	45,774,995
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	8	16,311,328	0	0	0	0	8	16,311,328
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	16	5,214,000	0	0	0	0	16	5,214,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	6	13,806,000	0	0	0	0	6	13,806,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	11	12,037,324	0	0	0	0	11	12,037,324
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	3	13,525,800	0	0	0	0	3	13,525,800
3050204001	Lemari Es	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3050204004	A.C. Split	Buah	28	154,100,000	0	0	0	0	28	154,100,000
3050206002	Televisi	Buah	4	43,624,000	0	0	0	0	4	43,624,000
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	405,000	0	0	0	0	1	405,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	4	32,000,000	0	0	0	0	4	32,000,000
3050206012	Wireless	Buah	1	1,700,000	0	0	0	0	1	1,700,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	8	28,403,462	0	0	0	0	8	28,403,462
3050206020	Camera Video	Buah	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
3050206030	Tiang Bendera	Buah	2	24,000	0	0	0	0	2	24,000
3050206033	Water Filter	Buah	1	84,000	0	0	0	0	1	84,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tgl Data : 30/07/24 6:25 PM

Tgl Cetak : 31/07/24 1:13 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307928 PENGADILAN AGAMA BIMA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206036	Dispenser	Buah	3	272,000	0	0	0	0	3	272,000
3050206040	Palu Sidang	Buah	2	24,000	0	0	0	0	2	24,000
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	3,769,920	0	0	0	0	1	3,769,920
3050206046	Handy Cam	Buah	1	10,000,000	0	0	0	0	1	10,000,000
3050206060	Asbak Tinggi	Buah	8	3,999,992	0	0	0	0	8	3,999,992
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	9,530,000	0	0	0	0	1	9,530,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	10	23,131,000	0	0	0	0	10	23,131,000
3060101079	Microphone Cable	Buah	11	11,000,000	0	0	0	0	11	11,000,000
3060102132	Video Conference	Buah	1	50,000,000	0	0	0	0	1	50,000,000
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	2	79,999,998	0	0	0	0	2	79,999,998
3060201010	Facsimile	Buah	1	570,000	0	0	0	0	1	570,000
3060347002	Genset	Buah	1	200,000,000	0	0	0	0	1	200,000,000
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000	0	0	0	0	1	17,840,000
3100102001	P.C Unit	Buah	54	608,085,237	0	0	0	0	54	608,085,237
3100102002	Lap Top	Buah	29	388,160,324	0	0	0	0	29	388,160,324
3100203002	Monitor	Buah	5	26,510,000	0	0	0	0	5	26,510,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	24	48,365,460	0	0	0	0	24	48,365,460
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	55,061,669	0	0	0	0	4	55,061,669
3100204001	Server	Buah	3	146,810,000	0	0	0	0	3	146,810,000
3100204002	Router	Buah	1	9,255,000	0	0	0	0	1	9,255,000
3100204014	Rak Server	Buah	1	9,866,590	0	0	0	0	1	9,866,590
133111	Gedung dan Bangunan		4	4,224,343,200	0	0	0	0	4	4,224,343,200
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	3,863,963,200	0	0	0	0	1	3,863,963,200
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	87,765,000	0	0	0	0	1	87,765,000
4010202001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Unit	1	118,509,000	0	0	0	0	1	118,509,000
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	154,106,000	0	0	0	0	1	154,106,000
135121	Aset Tetap Lainnya		51	5,348,929	0	0	0	0	51	5,348,929
6010101001	Monografi	Buah	15	1,267,209	0	0	0	0	15	1,267,209
6010101999	Buku Lainnya	dummy	36	4,081,720	0	0	0	0	36	4,081,720
TOTAL				11,073,037,254	0	0	0	0	36	11,073,037,254

BIMA, 31 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



USMAN, S. Ag
196612311997031021

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307928 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 30/07/24 6:25 PM

Tgl Cetak : 31/07/24 1:15 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		2,188	3,538,955,000	0	0	0	3,538,955,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	920	623,668,000	0	0	0	623,668,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	1,268	2,915,287,000	0	0	0	2,915,287,000
132111	Peralatan dan Mesin		516	3,304,390,125	(2,891,903,400)	(78,905,975)	(2,970,809,375)	333,580,750
3020101003	Station Wagon	Unit	3	487,000,003	(487,000,003)	0	(487,000,003)	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	8	141,130,400	(141,130,400)	0	(141,130,400)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	3	9,834,073	(9,834,073)	0	(9,834,073)	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	17	58,702,797	(58,702,797)	0	(58,702,797)	0
3050104003	Rak Besi	Buah	11	36,473,272	(36,473,272)	0	(36,473,272)	0
3050104004	Rak Kayu	Buah	10	22,799,996	(22,799,996)	0	(22,799,996)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	3,000,000	(3,000,000)	0	(3,000,000)	0
3050104007	Brandkas	Buah	1	12,110,660	(12,110,660)	0	(12,110,660)	0
3050104013	Buffet	Buah	4	9,548,000	(9,548,000)	0	(9,548,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	20,000,000	(20,000,000)	0	(20,000,000)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	25,544,667	(25,544,667)	0	(25,544,667)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	29,599,998	(29,599,998)	0	(29,599,998)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	2,089,959	(2,089,959)	0	(2,089,959)	0
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	27,500,000	(13,750,000)	(2,750,000)	(16,500,000)	11,000,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	71	101,406,590	(101,406,590)	0	(101,406,590)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	108	237,788,611	(237,788,611)	0	(237,788,611)	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	4	6,600,000	(6,600,000)	0	(6,600,000)	0
3050201005	Sice	Buah	9	45,774,995	(45,774,995)	0	(45,774,995)	0
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	8	16,311,328	(16,311,328)	0	(16,311,328)	0
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	16	5,214,000	(5,214,000)	0	(5,214,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	6	13,806,000	(13,806,000)	0	(13,806,000)	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	11	12,037,324	(12,037,324)	0	(12,037,324)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	3	13,525,800	(13,525,800)	0	(13,525,800)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	1	1,500,000	(1,500,000)	0	(1,500,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	28	154,100,000	(154,100,000)	0	(154,100,000)	0
3050206002	Televisi	Buah	4	43,624,000	(32,374,000)	(2,250,000)	(34,624,000)	9,000,000
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	405,000	(405,000)	0	(405,000)	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	4	32,000,000	(16,000,000)	(3,200,000)	(19,200,000)	12,800,000
3050206012	Wireless	Buah	1	1,700,000	(1,700,000)	0	(1,700,000)	0
3050206017	Unit Power Supply	Buah	8	28,403,462	(28,403,462)	0	(28,403,462)	0
3050206020	Camera Video	Buah	1	2,500,000	(2,500,000)	0	(2,500,000)	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	2	24,000	(24,000)	0	(24,000)	0
3050206033	Water Filter	Buah	1	84,000	(84,000)	0	(84,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307928 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 30/07/24 6:25 PM

Tgl Cetak : 31/07/24 1:15 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050206036	Dispenser	Buah	3	272,000	(272,000)	0	(272,000)	0
3050206040	Palu Sidang	Buah	2	24,000	(24,000)	0	(24,000)	0
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	3,769,920	(3,769,920)	0	(3,769,920)	0
3050206046	Handy Cam	Buah	1	10,000,000	(10,000,000)	0	(10,000,000)	0
3050206060	Asbak Tinggi	Buah	8	3,999,992	(3,999,992)	0	(3,999,992)	0
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	9,530,000	(4,765,000)	(953,000)	(5,718,000)	3,812,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	10	23,131,000	(22,117,400)	(1,013,600)	(23,131,000)	0
3060101079	Microphone Cable	Buah	11	11,000,000	(5,500,000)	(1,100,000)	(6,600,000)	4,400,000
3060102132	Video Conference	Buah	1	50,000,000	(25,000,000)	(5,000,000)	(30,000,000)	20,000,000
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	2	79,999,998	(79,999,998)	0	(79,999,998)	0
3060201010	Facsimile	Buah	1	570,000	(570,000)	0	(570,000)	0
3060347002	Genset	Buah	1	200,000,000	(80,000,000)	(10,000,000)	(90,000,000)	110,000,000
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000	(17,840,000)	0	(17,840,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	54	608,085,237	(478,814,612)	(35,831,875)	(514,646,487)	93,438,750
3100102002	Lap Top	Buah	29	388,160,324	(331,935,324)	(10,620,000)	(342,555,324)	45,605,000
3100203002	Monitor	Buah	5	26,510,000	(26,510,000)	0	(26,510,000)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	24	48,365,460	(43,465,460)	(1,225,000)	(44,690,460)	3,675,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	55,061,669	(30,249,169)	(4,962,500)	(35,211,669)	19,850,000
3100204001	Server	Buah	3	146,810,000	(146,810,000)	0	(146,810,000)	0
3100204002	Router	Buah	1	9,255,000	(9,255,000)	0	(9,255,000)	0
3100204014	Rak Server	Buah	1	9,866,590	(9,866,590)	0	(9,866,590)	0
133111	Gedung dan Bangunan		4	4,224,343,200	(823,543,420)	(50,342,606)	(873,886,026)	3,350,457,174
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	3,863,963,200	(668,739,880)	(47,689,900)	(716,429,780)	3,147,533,420
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	87,765,000	(13,422,881)	(1,032,529)	(14,455,410)	73,309,590
4010202001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Unit	1	118,509,000	(118,509,000)	0	(118,509,000)	0
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	154,106,000	(22,871,659)	(1,620,177)	(24,491,836)	129,614,164
135121	Aset Tetap Lainnya		51	5,348,929	0	0	0	5,348,929
6010101001	Monografi	Buah	15	1,267,209	0	0	0	1,267,209
6010101999	Buku Lainnya	dummy	36	4,081,720	0	0	0	4,081,720
JUMLAH			2,759	11,073,037,254	(3,715,446,820)	(129,248,581)	(3,844,695,401)	7,228,341,853

BIMA, 31 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



USMAN, S. Ag
196612311997031021